

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Provinsi Bali telah lama memposisikan diri sebagai episentrum pariwisata global, sebuah identitas yang bukan hanya sekadar citra, melainkan fondasi struktural bagi perekonomiannya. Ketergantungan ekonomi yang tinggi pada sektor pariwisata merupakan karakteristik yang tak terbantahkan, di mana sektor akomodasi, makan-minum, dan jasa pariwisata lainnya menjadi tulang punggung yang menopang pertumbuhan regional (Sari et al., 2022).

Berbagai analisis dan laporan menunjukkan secara konsisten bahwa struktur ekonomi Bali sangat didominasi oleh sektor pariwisata, yang berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Ketergantungan ini juga diperkirakan akan berlanjut, dengan pariwisata yang diprediksi akan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun-tahun mendatang (Sari et al., 2022).

Ketergantungan tersebut terlihat secara nyata ketika pandemi COVID-19 melanda sejak awal tahun 2020. Pembatasan perjalanan internasional dan domestik menyebabkan aktivitas pariwisata di Bali mengalami penurunan yang sangat drastis. Dampaknya, penerimaan daerah yang bersumber dari pajak hotel, restoran, hiburan, dan retribusi daerah mengalami penurunan signifikan. Pada saat yang sama, Pemerintah Provinsi Bali harus meningkatkan belanja daerah untuk penanganan krisis kesehatan, pemberian bantuan sosial, serta program pemulihan

ekonomi. Kondisi ini menimbulkan tekanan fiskal yang besar karena penurunan pendapatan terjadi bersamaan dengan peningkatan belanja daerah (Ngurah, 2024).

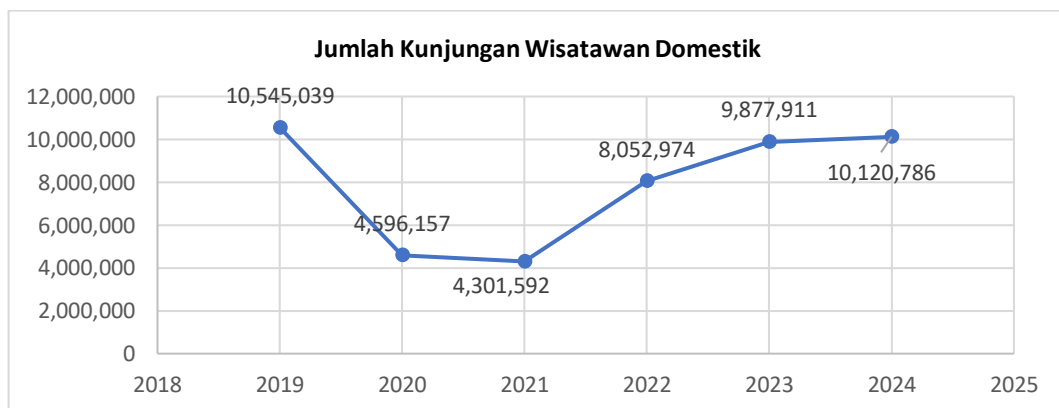
Dampak pandemi terhadap sektor pariwisata Bali tercermin dari data kunjungan wisatawan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik mengalami penurunan tajam selama periode 2020–2021. Penurunan aktivitas pariwisata tersebut berdampak langsung terhadap kapasitas fiskal daerah, mengingat sektor pariwisata merupakan sumber utama PAD Provinsi Bali. Kondisi ini menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara dinamika sektor pariwisata, pendapatan daerah, dan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai belanja publik (Badan Pusat Statistik (BPS), 2024; Mawarni, 2024).



Sumber : BPS Bali Tahun 2025 Diolah Oleh Penulis

**Gambar 1.1 Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Provinsi Bali
Tahun 2020 – 2024**

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Bali pada periode 2019-2024 menunjukkan dinamika yang signifikan. Pada tahun 2019, jumlah kunjungan tercatat sebesar 6.275.210 orang, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat tajam menjadi 1.069.473 orang sebagai akibat dari pandemi COVID-19 yang berdampak pada pembatasan mobilitas internasional. Penurunan tersebut berlanjut pada tahun 2021, di mana jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tercatat hanya sebanyak 51 orang. Seiring dengan mulai diterapkannya kebijakan pelonggaran pembatasan perjalanan serta upaya pemulihan sektor pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 2.155.747 orang. Tren peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2023 dengan jumlah kunjungan sebesar 5.273.258 orang, dan pada tahun 2024 meningkat lebih lanjut hingga mencapai 6.333.360 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata di Provinsi Bali telah mengalami pemulihan yang signifikan dan mendekati kondisi sebelum pandemi.



Sumber : BPS Bali Tahun 2025 Diolah Oleh Penulis

Gambar 1.2 Kunjungan Wisatawan Domestik ke Provinsi Bali

Tahun 2020 – 2024

Jumlah kunjungan wisatawan domestik ke Provinsi Bali pada periode 2019–2024 menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan meningkat setelah pandemi COVID-19. Pada tahun 2019, jumlah kunjungan wisatawan domestik tercatat sebesar 10.545.039 orang, kemudian mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 menjadi 4.596.157 orang akibat pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat. Penurunan tersebut berlanjut pada tahun 2021 dengan jumlah kunjungan sebesar 4.301.592 orang. Seiring dengan pemulihan kondisi ekonomi dan pelonggaran kebijakan pembatasan, jumlah kunjungan wisatawan domestik kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2022 menjadi 8.052.974 orang. Tren peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2023 dengan jumlah kunjungan sebesar 9.877.911 orang, dan pada tahun 2024 meningkat lebih lanjut hingga mencapai 10.120.786 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa wisatawan domestik memiliki peran penting dalam mendukung pemulihan sektor pariwisata di Provinsi Bali pascapandemi.

Menurunnya PAD mendorong Pemerintah Provinsi Bali melakukan *refocusing* dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memprioritaskan belanja pada penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Selain itu, pemerintah daerah juga memperoleh dukungan fiskal dari pemerintah pusat melalui skema Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Meskipun bantuan tersebut berperan sebagai penyangga fiskal, peningkatan pendapatan yang bersumber dari transfer pusat tidak secara langsung mencerminkan peningkatan kemandirian fiskal daerah, karena belanja daerah tetap berada pada tingkat yang tinggi.

Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Bali. Salah satu indikator formal yang digunakan untuk mencerminkan pengelolaan keuangan daerah adalah hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Pemerintah Provinsi Bali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama periode penelitian. Opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan daerah telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan bebas dari salah saji material. Namun demikian, opini audit tersebut lebih menekankan pada kewajaran penyajian laporan keuangan dan kepatuhan terhadap standar akuntansi, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara menyeluruh.

Meskipun Pemerintah Provinsi Bali secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kinerja keuangan daerah secara komprehensif. Opini WTP lebih menitikberatkan pada aspek kewajaran penyajian laporan keuangan dan kepatuhan terhadap standar akuntansi, bukan pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja secara efisien, efektif, dan mandiri. Dalam konteks Provinsi Bali yang mengalami fluktuasi pendapatan akibat krisis dan proses pemulihan sektor pariwisata, penilaian kinerja keuangan menjadi penting untuk melihat sejauh mana peningkatan pendapatan daerah diikuti oleh pengelolaan belanja yang optimal dan berkelanjutan.

Memasuki periode pemulihan ekonomi pada tahun 2022–2024, sektor pariwisata Bali mulai menunjukkan tren kebangkitan seiring dengan pelonggaran pembatasan perjalanan. Peningkatan jumlah wisatawan berdampak pada kenaikan pendapatan daerah. Namun, peningkatan pendapatan tersebut diikuti oleh peningkatan belanja daerah untuk mendukung pembangunan, pemulihan ekonomi, dan peningkatan pelayanan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan daerah perlu diimbangi dengan pengelolaan belanja yang efisien agar kinerja keuangan pemerintah daerah dapat meningkat secara berkelanjutan (Mawarni, 2024).

Hasil Penelitian Terdahulu menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja. Penelitian Afifah Salsabila Okadria dan Yentisna (2025) pada Pemerintah Kota Padang periode 2020–2024 membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, baik secara parsial maupun simultan. Temuan serupa juga ditunjukkan oleh Muhammad Fahmi, Karin Yudha Ningrum, Dina Mariana, & Urai Achmad Rivaldi (2023) yang meneliti pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat, di mana pendapatan daerah dan belanja daerah terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil-hasil tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan yang diikuti dengan pengelolaan belanja yang efektif berperan penting dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian Dafillah Vike Istiqomah, Dwi Fera Anandyta, Olivia Amalia dan Zida Rizqi Eryana (2025) serta Zahrotul Mukaiyaroh

dan Sri Anik (2025) juga menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan daerah berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Meskipun sebagian besar Penelitian Terdahulu menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih dilakukan pada kondisi ekonomi yang relatif stabil dan menggunakan variasi indikator belanja tertentu, seperti belanja modal. Dengan demikian, kajian yang secara komprehensif menggunakan Total Belanja Daerah serta menelaah dinamika pengelolaan keuangan daerah pada masa krisis dan pemulihan ekonomi masih terbatas. Kondisi ini relevan dengan Provinsi Bali yang mengalami kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan memasuki fase pemulihan pada periode 2020–2024, sehingga diperlukan pengujian empiris dalam konteks tersebut. Peningkatan Pendapatan Daerah yang diikuti dengan pengelolaan Belanja Daerah secara efektif dan efisien diduga mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Daerah dan Total Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali selama periode tahun 2020–2024.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan pendapatan daerah, Belanja Daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah pada pemerintah daerah provinsi Bali periode 2020 -2024.

2. Bagaimana pengaruh pendapatan daerah dan Belanja Daerah secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi Bali periode 2020-2024.
3. Bagaimana pengaruh pendapatan daerah secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi Bali periode 2020-2024.
4. Bagaimana pengaruh Total Belanja Daerah secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi Bali periode 2020-2024.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perkembangan pendapatan daerah, Belanja Daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah pada pemerintah daerah provinsi Bali periode 2020-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan daerah dan Belanja Daerah secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi Bali periode 2020-2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan daerah secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi Bali periode 2020-2024.
4. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Daerah secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi Bali periode 2020-2024.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Memperkaya literatur dan menambah referensi dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara pendapatan daerah, belanja daerah, dan kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Menyajikan bukti empiris mengenai pengaruh pendapatan daerah dan Belanja Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dengan fokus kajian pada Provinsi Bali sebagai representasi daerah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sektor pariwisata.
3. Menjadi landasan dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang menelaah permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah pada masa krisis maupun pascakrisis.
4. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kerangka konseptual dalam akuntansi sektor publik, khususnya terkait hubungan antara pendapatan daerah, belanja daerah, dan kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Bali, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas

pengelolaan pendapatan dan belanja daerah guna memperkuat kinerja keuangan.

2. Bagi lembaga legislatif dan pembuat kebijakan, penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan empiris dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini berfungsi sebagai sarana informasi publik untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola keuangan secara efisien dan bertanggung jawab.
4. Bagi instansi pengawas dan pembina, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Dalam Negeri, penelitian ini dapat menjadi acuan evaluatif dalam memperkuat sistem pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya penelitian yang ditetapkan untuk memperjelas objek dan membatasi ruang lingkup penelitian (Dartiningsih, 2020). Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Pemilihan lokasi didasarkan pada ketersediaan data laporan keuangan daerah yang lengkap dan dapat diakses secara resmi, khususnya Laporan Realisasi APBD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) periode tahun 2020–2024. Data penelitian diperoleh dari sumber resmi seperti Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta publikasi keuangan Pemerintah Provinsi Bali.

Provinsi Bali dipilih karena memiliki karakteristik ekonomi yang khas dengan ketergantungan tinggi pada sektor pariwisata, serta mengalami dinamika fiskal yang signifikan selama periode pandemi dan pemulihan ekonomi. Kondisi tersebut menjadikan Provinsi Bali relevan sebagai lokasi penelitian untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan selama enam bulan, yaitu mulai dari Oktober 2025 hingga Maret 2026. Selama periode tersebut, kegiatan penelitian dilaksanakan secara bertahap dan terencana, dimulai dari penyusunan serta penyempurnaan proposal penelitian, penentuan objek dan variabel penelitian, hingga pelaksanaan pengumpulan data. Selanjutnya, data yang telah diperoleh diolah dan dianalisis sesuai dengan metode penelitian yang digunakan. Tahap akhir penelitian meliputi penyusunan, pembahasan, serta penyempurnaan hasil penelitian yang kemudian dirangkum dalam bentuk laporan akhir penelitian. Tabel Waktu Penelitian terlampir (Lampiran 1).